

**PERAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
(BPKAD)
DALAM PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH
DI KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
PROVINSI PAPUA**

Betuel Mimin
NPP 30.1612

Asdaf Kabupaten Bintang, Provinsi Papua
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah
Pembimbing Skripsi: Isman Hadi Jaya, S.AP.M.Si

ABSTRACT

Problem Statement : Regional Property of Pegunungan Bintang Regency in the administration of Regency government every year continues to increase, both in the administration of government, Development and Society. **Purpose:** The purpose of writing this thesis is to know and analyze the role of regional financial and asset management agencies in securing regional property in Pegunungan Bintang Regency, Papua Province, to know and analyze the supporting and inhibiting factors of the role of regional financial and asset management agencies in securing regional property in Pegunungan Bintang Regency, Papua Province, to know and analyze efforts to overcome the inhibiting factors of the agency's role financial management and regional assets in securing regional property in Pegunungan Bintang Regency, Papua Province.. **Method :** The theory used in Biddle and Thomas, (2013: 215) is people who play a role, behavior in roles, position and behavior of people in roles and the relationship between people and behavior. The research design used in this study is qualitative, descriptive method with an inductive approach.. **Result:** In accordance with the results of research and findings in the field, it can be concluded that the role of the Regional Financial and Asset Management Agency in securing regional property in Pegunungan Bintang Regency, Papua Province is as The implementation of codification / labeling has not been able to run well due to lack of human resources, while assets in BPKAD Pegunungan Bintang Regency there are a lot of assets that must be recorded, While human resources are still the main problem there.. **Conclusion:** that the role of the Regional Financial and Asset Management Agency in securing regional property has not been effective. **Suggestion:** The Pegunungan Bintang Regency Government needs to add personnel or human resources to the asset management section, so that the asset data collection process can run effectively and efficiently.

Keywords: Security of Regional Property, Regional Assets

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : Barang Milik Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten setiap tahunnya memang terus meningkat, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan. **Tujuan :** Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran badan pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam pengamanan barang milik daerah di Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua, untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat peran badan pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam pengamanan barang milik daerah di Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua, untuk mengetahui dan menganalisis upaya mengatasi faktor-faktor penghambat peran badan pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam pengamanan barang milik daerah di Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua. **Metode :** Teori yang di gunakan dalam Biddle dan Thomas, (2013:215) yakni orang yang berperan, perilaku dalam peran, kedudukan dan perilaku orang dalam peran dan kaitan antara orang dan perilaku. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, deskriptif dengan pendekatan induktif. **Hasil :** Sesuai dengan hasil penelitian dan temuan di lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa Peran Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Dalam Pengamanan Barang Milik Daerah Di Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua adalah sebagai Pelaksanaan kodefiksi/labeling belum dapat berjalan dengan baik dikarenakan kekurangan sumber daya manusia, sedangkan aset di BPKAD Kabupaten Pegunungan Bintang ada banyak sekali aset-aset yang harus dicatat, sementara sumber daya manusia masi menjadi masalah utama disana.. **Kesimpulan :** bahwa Peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Pengamanan Barang Milik Daerah belum efektif. **Saran :** Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang Perlu menambah tenaga kepegawaian atau sumber daya manusia pada bagian pengelola aset, agar pada proses pendataan aset nanti dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Kata Kunci: Pengamanan Barang Milik Daerah, Aset Daerah

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Belum maksimalnya pengelolaan aset/barang milik daerah adalah salah satu manifestasi pelaksanaan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), saat ini yang menjadi tuntutan masyarakat adalah terwujudnya sistem pengelolaan aset kekayaan daerah yang memadai, informatif, transparan, dan akuntabel. Aset/barang daerah merupakan komponen sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan aset/barang milik daerah memerlukan perhatian tersendiri karena terjadi peningkatan nilai aset/barang milik daerah dari tahun ke tahun yang cukup signifikan. Sesuai dengan informasi yang didapat melalui telepon tanggal 23/10/2022 bersama Bapak Yanto Sasaka S.Sos sebagai Kepala Bidang Aset di BPKAD Kabupaten Pegunungan Bintang bahwa pengamanan atas barang milik daerah atau aset Kabupaten Pegunungan Bintang yang dikelola oleh pemerintah daerah belum optimal/tidak dikelola dengan baik, sehingga banyak aset daerah yang belum terinventarisir dengan

baik. Menurut pendapat beliau kebijakan yang harus di ambil oleh pemerintah daerah Kabupaten Pegunungan Bintang untuk mengoptimalkan pengamanan atas aset daerah adalah sebagai berikut:

1. Menempatkan orang yang berpengalaman atau profesional dalam mengatur dan mengelola aset daerah kabupaten Pegunungan Bintang;
2. Mencatat semua inventaris aset kabupaten Pegunungan Bintang;
3. Memanfaatkan aset yang ada untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Kabupaten Pegunungan Bintang.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang menyebutkan bahwa salah satu penyebab Laporan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang dalam penatausahaan barang milik daerah tersebut adalah karena belum tertibnya pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan aturan yang berlaku. Pada laporan tersebut dicantumkan bahwa penyebab belum tertibnya pengelolaan barang milik daerah dalam hal penatausahaan disebabkan karena Ketidakmampuan organisasi perangkat daerah dalam sistem Penatausahaan barang milik daerah dan kurang pahalannya organisasi perangkat daerah terhadap peraturan yang berlaku.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Barang Milik Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten setiap tahunnya memang terus meningkat, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan. Dengan demikian diperlukan kebijakan dan langkah yang terkoordinasikan serta terpadu mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah oleh Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang. Oleh karena itulah barang milik daerah merupakan kekayaan atau aset daerah yang harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan arti dan manfaat sebanyak-banyaknya, dan tidak hanya sebagai kekayaan daerah yang besar tetapi juga harus dikelola secara efisien dan efektif agar tidak menimbulkan pemborosan serta harus dapat dipertanggung jawabkan.

Adapun kaitan antara judul penelitian ini dengan Program Studi penulis adalah bersama-sama berbicara terkait administrasi. Dimana dalam pengamanan barang milik daerah didalamnya pasti ada juga yang namanya pencatatan kode barang, jenis barang, merek barang, kualitas barang dan lain sebagainya, hal berikut ini merupakan salah satu bentuk administrasi. Maka dari itu, penulis mengambil judul yaitu “Peran Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Dalam Pengamanan Barang Milik Daerah Di Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua”

1.3. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian pertama yang berjudul Pelaksanaan Pengelolaan Aset Tetap Daerah yang berisi Pelaksanaan pengelolaan aset tetap daerah milik Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar. Dalam melakukan koordinasi pengelolaan aset tetap daerah yang ditinjau dari akuntabilitas kinerja belum optimal, karena masih banyak terdapat tidak sinkronnya nilai aset, inventaris dan sistim pelaporan serta pengendalian yang belum baik. Dikarenakan perencanaan pengadaan barang tidak sesuai dengan kebutuhan unit kerja dan ketersediaan dana yang terbatas (Erizul dan Febri,2914) Penelitian kedua yang berjudul Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 menjelaskan Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Aset Tetap/Barang

Milik Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto secara keseluruhan telah dilakukan dengan maksimal dan sesuai. (Ikbar dan Mustakim,2017)

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni akan mengetahui mengetahui dan memahami Peran Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Dalam Pengamanan Barang Milik Daerah Di Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua dan hasilnya dapat dijadikan acuan untuk perbaikan pemerintahan daerah di Kabupaten Pegunungan Bintang provinsi Papua kedepannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan pengumpulan data menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan induktif.

1.5. Tujuan

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran badan pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam pengamanan barang milik daerah di Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua, untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat peran badan pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam pengamanan barang milik daerah di Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua, untuk mengetahui dan menganalisis upaya mengatasi faktor-faktor penghambat peran badan pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam pengamanan barang milik daerah di Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua.

II. METODE

Teori yang di gunakan dalam Biddle dan Thomas dalam sarwono, (2013:215) yakni orang yang berperan, perilaku dalam peran, kedudukan dan perilaku orang dalam peran dan kaitan antara orang dan perilaku. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, deskriptif dengan pendekatan induktif. Menurut Sugiyono, (2011), metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data yang dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Peran BPKAD dalam Pengamanan Barang Milik Daerah di Kabupaten Pegunungan Bintang provinsi Papua.

A. Inventarisasi Aset

Pada proses pengadaan aset Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) telah dilakukan dengan sebaik mungkin, hal ini dapat diketahui lewat proses pengadaan aset atau barang yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang, pada pengadaan aset-aset berdasarkan dari permohonan dari setiap OPD yang kemudian dimasukkan dalam Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD). Kemudian, proses pendataan aset di BPKAD Kabupaten Pegunungan Bintang belum berjalan dengan baik, proses kodifikasi/labeling pada aset juga tidak baik karena kekurangan pegawai atau

sumberdaya manusia sehingga membuat proses pencatatan menjadi terhambat atau bahkan terlewat dalam penulisan.

Hal ini sudah pasti belum sesuai dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007. Namun, dengan munculnya permasalahan inventarisasi aset di Kabupaten Pegunungan Bintang ini dapat membuktikan bahwa sebenarnya kegiatan inventarisasi asset-aset ini belum dapat berjalan dengan baik, padahal proses ini adalah jantung bagi sebuah instansi pemerintahan atau OPD di dalam proses pengelolaan aset, dan jika kegiatan inventarisasi berjalan baik maka memiliki manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang itu sendiri, agar OPD dan Pemerintahan Kabupaten Pegunungan Bintang dapat mengendalikan, memanfaatkan, mengawasi, serta mengamankan setiap asset-aset Kabupaten Pegunungan Bintang yang tersebar di setiap OPD, dan juga jika inventarisasi berjalan dengan baik pengelola dan bahkan pemerintah dapat mengetahui bahwa asset tersebut, sudah dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan tujuan dan fungsinya atau belum.

Permasalahan inventarisasi aset yaitu, kurangnya tenaga pegawai atau sumber daya manusia yang dapat mengakibatkan proses pencatatan inventarisasi menjadi kurang maksimal. Untuk itu sumber daya manusia di pengelola aset menjadi sasaran utama permasalahan pendataan aset di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang.

B. Legal audit

Legal audit ini merupakan lingkup kerja manajemen aset berupa inventarisasi aset, pada poin ini juga ada proses mencari solusi atas permasalahan legal, dan strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan legal yang terkait dengan asset-aset di Kabupaten Pegunungan Bintang. Dimana, seperti hasil di atas, bahwa proses legal audit yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang dengan cara yang tertib pada proses inventarisasi, sehingga ini dapat memudahkan BPKAD Kabupaten Pegunungan Bintang dalam penyajian data-data secara valid, tetapi jika dilihat dari proses legal audit yang dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Pegunungan Bintang yang kurang berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan kurangnya pegawai atau sumber daya manusia pada bagian pengelola aset.

C. Penilaian Aset

Dalam Proses penilaian aset-aset pada BPKAD Kabupaten Pegunungan Bintang seperti hasil di atas maka dapat diketahui bahwa, BPKAD Kabupaten Pegunungan Bintang tidak melakukan proses penilaian aset, tetapi menggunakan jasa penilai independen dari pihak yang berwenang, dimana penilai yang dipilih oleh Pemerintah Kabupaten ini, harus memiliki sertifikat pada penilaian aset karena tidak semua dapat menjadi penilai, sehingga hal ini juga dapat memudahkan dalam menetapkan serta mengetahui nilai barang atau nilai dari aset tetap tersebut.

Penilaian BMD ini merupakan proses ilmiah yang dilakukan oleh seorang penilai guna mendapatkan estimasi nilai suatu barang atau aset milik Kabupaten Pegunungan Bintang, maka proses penilaian dapat dilakukan dengan cara di nilai oleh tim penilai dengan melihat berbagai hal seperti lokasi, merek, jumlah, tipe, jenis, ukuran kondisi, ukuran kondisi dan kelengkapan data lainnya, untuk mendukung nilai barang atau aset tersebut.

D. Optimalisasi Aset

Dalam Proses optimalisasi pada aset ditemukan bahwa belum berjalan dengan baik dan maksimal, hal ini dapat dilihat pada Aset yang berpotensi tentunya harus dapat digunakan dengan sebaik mungkin agar aset tersebut tidak hanya dimiliki tanpa dipergunakan atau dimanfaatkan. Oleh sebab itu, aset yang dimiliki harus dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Karena aset tersebut sangat berpotensi apabila dioptimalkan dalam penggunaannya karena akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dan untuk laporan yang ada di BPKAD Kabupaten Pegunungan Bintang ini harusnya berjalan kembali dan tidak hanya mengandalkan pengelola aset yang menanggung semua laporan tetapi juga melibatkan semua bidang. Masalah yang sama ada juga ialah tidak adanya ruangan untuk menyimpan aset, hal ini sangatlah tidak sesuai dengan prosedur yang ada, sebab inilah yang menjadikan pengelolaan aset dalam optimalisasinya kurang baik dan belum maksimal.

E. Pengawasan dan pengendalian

Proses pengawasan dan pengendalian aset daerah di Kabupaten Pegunungan Bintang, dapat diketahui berdasarkan hasil diatas yang melibatkan seluruh informan, pada proses kegiatan pengawasan dan pengendalian aset daerah ini dilihat bahwa berjalan kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya pegawai atau sumber daya manusia dalam proses inventarisasi dan pelebelan, walaupun demikian pihak Inspektorat Kabupaten Pegunungan Bintang, selalu memantau dan melihat kegiatan inventaris yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab Pegunungan Bintang terkhususnya dalam menyusun 5 Kartu Inventaris Barang (KIB)..

3.2. Diskusi Temuan Utama

Aset Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang dapat dilihat aset yang nilainya terbesar adalah Gedung, Bangunan dan monumen yaitu senilai Rp 1.984.599.874.546,55 sedangkan Aset yang paling rendah adalah Aset Kontruksi dalam pengerjaan senilai Rp 45.284.756.000,00. Barang Milik Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten setiap tahunnya memang terus meningkat, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

IV. KESIMPULAN

Pelaksanaan kodefiksi/labeling belum dapat berjalan dengan baik dikarenakan kekurangan sumber daya manusia, sedangkan aset di BPKAD Kabupaten Pegunungan Bintang ada banyak sekali aset-aset yang harus dicatat, sementara sumber daya manusia masi menjadi masalah utama disana. Membahas tentang dokumen, sertifikat dan surat kepemilikan yang sudah terinventarisir dengan baik guna untuk legal audit. Aset yang berpotensi haruslah digunakan dengan sebaik-baik mungkin agar aset tersebut tidak hanya dimiliki tanpa dipergunakan atau dimanfaatkan. Oleh sebab itu, aset yang dimiliki Pemerintah Kabupaten ini harus dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Karena aset yang berpotensi apabila dioptimalkan dengan baik, maka dalam penggunaannya akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Laporan yang ada pada BPKAD haruslah berjalan kembali dan tidak hanya mengandalkan pengelola aset yang menanggung semua laporan setiap bidang tetapi juga melibatkan semua bidang. Dan adapula masalah tidak adanya ruangan untuk menyimpan aset, ini

sangatlah tidak sesuai dengan prosedur yang ada, dan dapat menjadikan pengelolaan aset dalam optimalisasinya kurang baik dan tidak maksimal.. **Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini terbatas waktu dan biaya peneliti, sehingga hanya dapat dilakukan pada satu Kabupaten saja untuk diteliti. **Arah Masa Depan Penelitian.** Penelitian ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu penulis memberikan saran untuk dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya pada lokasi atau program yang sama dengan program Kabupaten Pegunungan Bintang untuk menemukan hasil yang mendalam terutama pada Peran BPKAD dalam Pengamanan Barang Milik Daerah di Kabupaten Pegunungan Bintang provinsi Papua.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian ini terutama kepada Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing serta Dosen Penguji yang senantiasa telah membimbing penulis. Dan juga kepada Orang Tua yang telah berjasa besar terhadap selesainya penulisan skripsi ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Erizul dan Febri. (2014). Pelaksanaan Pengelolaan Aset Tetap Daerah. Jurnal FISIP Universitas Riau. Vol 2, No. 2, 115-120
- Ikbar dan Mustakim. (2017). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Jurnal Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Vol 7, No.1, 69-85
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Sarlito Wirawan Sarwono (2013) Teori - Teori Psikologi Sosial.,hlm.215
- Sugiyono. (2011). "Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D". Bandung: Alfa Beta